

ABSTRAK

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan pidatonya pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, menekankan perlu dilakukannya upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan optimal di instansi pemerintahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan. Selanjutnya, oleh Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/ A/ JA/ 10/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, demikian pula oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sesuai Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor KEP-108/ O.3/ 10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ide dasar pembentukan TP4 ialah fakta terkait masifnya arah dan kebijakan pembangunan di pusat maupun daerah yang memerlukan pengawalan dalam pelaksanaannya agar terbebas dari segala bentuk penyimpangan, serta adanya tantangan yang selama ini dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum secara represif terhadap tindak pidana korupsi, yang dirasa belum cukup efektif dan optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta belum membawa dampak positif terhadap pembangunan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya yakni meliputi pencegahan/ preventif dan persuasif; pendampingan hukum; melakukan koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait; melakukan *monitoring* dan evaluasi; serta melakukan penegakan hukum represif, yang secara keseluruhan sudah cukup efektif dan optimal dalam akselerasi pembangunan dan menanggulangi tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Peran, TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

The President of Republic Indonesia Joko Widodo, through Presidential Instruction Number 7 of Year 2015 concerning the Action of Prevention and Eradication of Corruption and his speech at the 55th Bhakti Adhyaksa Memorial Day emphasized the need to do prevention of corruption effectively and optimally in the government institution that aimed to improve the public welfare by maintaining a smooth development program. Furthermore, by the Attorney General of Republic Indonesia H. M. Prasetyo followed up by forming an Escortment and Securement Team for the Government and Development (TP4) according to the Attorney General of Republic Indonesia's Decree Number: KEP-152/ A/ JA/ 10/ 2015 concerning the Establishment of Attorney of Republic Indonesia's Escortment and Securement Team of the Government and Development, as well as the Head of Central Java's High Attorney who formed High Attorney of Central Java's Regional Escortment and Securement Team of the Government and Development (TP4D), according to the Head of Central Java's High Attorney's Decree Number: KEP-108/ O. 3/ 10/ 2015 concerning the Establishment of High Attorney of Central Java's Regional Escortment and Securement Team for the Government and Development.

This paper uses the method of juridical empirical or non-doctrinal approach writing, with the qualitative research specification. Data and legal materials were collected through field research and library research methods. Analysis of the results of this study uses descriptive-analytical methods.

Based on research results, it can be concluded that the basic idea of the formation of TP4 was the fact related to the mass direction and development policies in central and regions that needed an escort in their implementation in order to be free from all forms of deviation, as well as the challenges that have been faced by the Attorney of Republic Indonesia in doing the repressive law enforcement against corruption, which was considered not effective and optimal enough in combating corruption, and has not brought a positive impact on development and the life of the nation. Regarding to the escortment and securement activities carried out by the High Attorney of Central Java's TP4D against the government and the development in Central Java Province, properly implemented according to its duties and functions which include prevention/ preventive and persuasive; legal assistance; coordination with APIP and/ or related institutions; conduct monitoring and evaluation; and doing the repressive law enforcement, which overall have been quite effective and optimal in accelerating development and coping with the corruption problems.

Keywords: *Role, High Attorney of Central Java's TP4D, Coping with Corruption*